

**PARADIPLOMASI KOTA SURABAYA DENGAN LIVERPOOL
PADA BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF, 2017–2022**

(Skripsi)

Oleh

RENDA LINTANG GINTAWANGI

NPM 1916071021



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PARADIPLOMASI KOTA SURABAYA DENGAN LIVERPOOL PADA BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF, 2017–2022

Oleh

RENDA LINTANG GINTAWANGI

Permasalahan pada aksesibilitas, tenaga pendidik, dan fasilitas belajar masih menjadi kendala bagi efektivitas program pendidikan inklusif di Surabaya, meski berbagai inisiatif telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya hingga berhasil mendapat beberapa pengakuan. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Surabaya menjalin paradiplomasi bersama Liverpool, yakni kota dengan pendidikan inklusif yang dinilai lebih unggul. Paradiplomasi tersebut adalah wujud keterlibatan Surabaya sebagai aktor subnasional dalam hubungan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan inklusif di Surabaya dan menganalisis paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh dari studi literatur dan wawancara, serta dianalisis menggunakan konsep pendidikan inklusif dan teori paradiplomasi, terutama mengacu pada kerangka analisis menurut Brian Hocking yang menjelaskan *international actorness* pemerintah subnasional melalui empat aspek: tujuan dan motivasi, sumber daya, tingkat partisipasi, dan strategi.

Hasilnya, komitmen untuk mengupayakan pemerataan akses pendidikan di tingkat lokal telah Surabaya realisasikan melalui penyediaan tenaga pendidik dan fasilitas, peningkatan infrastruktur ramah disabilitas, serta kolaborasi multisektoral, walau belum sepenuhnya menghapus hambatan belajar anak berkebutuhan khusus. Di sisi lain, paradiplomasi dengan Liverpool mencerminkan kapasitas Surabaya sebagai aktor subnasional yang mampu memobilisasi sumber daya manusia dan finansial, serta menjalin interaksi berlapis bersama mitra dan pemerintah pusat pada tahap pranegosiasi hingga pascanegosiasi dengan menggunakan *primary strategy* untuk meraih tujuannya, yaitu mencapai inklusifitas penuh pada pendidikan inklusifnya. Namun, dampak paradiplomasi ini masih parsial, sebab hanya berkontribusi meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan belum menjangkau isu aksesibilitas maupun fasilitas belajar pada pendidikan inklusif Surabaya.

Kata kunci: *international actorness*, Liverpool, paradiplomasi, pendidikan inklusif, Surabaya.

ABSTRACT

THE PARADIPLOMACY OF SURABAYA WITH LIVERPOOL ON INCLUSIVE EDUCATION, 2017–2022

By

RENDALINTANG GINTAWANGI

Despite several initiatives undertaken by the Surabaya City Government that have received some recognition, issues in accessibility, teaching staff, and learning facilities continue to hinder the effectiveness of inclusive education programs in Surabaya. This encouraged Surabaya to establish paradiplomacy with Liverpool, which has a more sophisticated inclusive education system. This paradiplomacy reflects Surabaya's involvement as a subnational actor in international relations. This study aimed to describe inclusive education in Surabaya and to analyze the paradiplomacy of Surabaya with Liverpool on inclusive education from 2017 to 2022. This study used a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through literature review and interviews. The analysis was conducted using the concept of inclusive education and paradiplomacy theory, with particular reference to Brian Hocking's analytical framework, which explains the international actorness of subnational governments through four aspects: aims and motivations, resources, level of participation, and strategies. The results indicated that Surabaya has demonstrated its commitment to promoting equitable access to education by providing educators and facilities, improving disability-friendly infrastructure, and fostering multisectoral collaboration. However, learning barriers for children with special needs have not yet been completely eliminated. On the other hand, paradiplomacy with Liverpool demonstrates Surabaya's capacity as a subnational actor capable of mobilizing human and financial resources and establishing multi-layered interactions with partners and the central government, using a primary strategy to achieve its goal of full inclusivity in inclusive education. However, the impact of this paradiplomacy remains limited, as it only contributed to enhancing the capabilities of educators and has not yet addressed issues related to accessibility or learning facilities in Surabaya's inclusive educational system.

Key words: international actorness, Liverpool, paradiplomacy, inclusive education, Surabaya

**PARADIPLOMASI KOTA SURABAYA DENGAN LIVERPOOL
PADA BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF, 2017–2022**

Oleh

RENDALINTANG GINTAWANGI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PARADIPLOMASI KOTA SURABAYA DENGAN
LIVERPOOL PADA BIDANG PENDIDIKAN
INKLUSIF, 2017-2022**

Nama Mahasiswa

: **Renda Lintang Gintawangi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1916071021**

Jurusan

: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Iwan Sulistyso, S.Sos., M.A.

NIP. 19860428 201504 1 004

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

NIP. 19920926 202409 2 001

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

Simen Sumanjeto Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



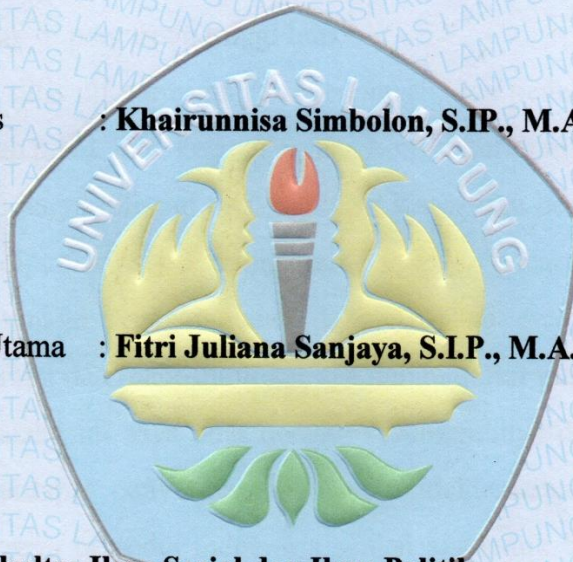
Sekretaris

: Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.



Penguji Utama

: Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Agustus 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Renda Lintang Gintawangi
NPM. 1916071021

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Juni 2001 dari pasangan Nasikin Notoprojo dan Almh. Siti Oom Rohmah. Peneliti mengawali pendidikan tingkat dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di MTs Negeri 2 Bandar Lampung sampai tahun 2016, dan berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, peneliti mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan. Peneliti memperoleh pengalaman profesional dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selama dua bulan pada tahun 2022 dan di tahun yang sama, peneliti juga mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengambil kelas *Public Relations* di Universitas Jember.

MOTTO

“If Allah helps you, no one can defeat you.”

(QS. Ali Imran 3:160)

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada Ayah, Ibu (Almh), Bunda
dan Saudara-saudara kandung tercinta, serta seluruh pembaca.

SANWACANA

Puji dan Syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, rida, dan karunia-Nya, skripsi berjudul “Paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada Bidang Pendidikan Inklusif, 2017—2022” dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
3. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan arahan akademik selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar dalam membimbing, serta memberikan bantuan dan masukan konstruktif secara rinci kepada peneliti mulai dari tahap pemilihan judul hingga keseluruhan proses penyusunan skripsi;
5. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang dengan penuh kesabaran senantiasa menanyakan progres peneliti dalam menyelesaikan seluruh tahapan penulisan skripsi, serta memberikan begitu banyak bantuan, masukan, semangat dan motivasi setiap peneliti menemukan kesulitan;
6. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, atas motivasi, saran, dan wawasan baru yang telah diberikan kepada peneliti

secara rinci dan jelas, sehingga dapat menuntun peneliti untuk memperbaiki kualitas penulisan skripsi ke arah yang lebih baik;

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, dan bantuan kepada peneliti selama masa perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi;
8. Para narasumber atas kesempatan, kesediaan waktu, penjelasan dan informasi yang telah memberikan kontribusi berharga bagi penelitian ini, yakni Bapak Galih dan Ibu Sasha selaku Staf Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya, serta Ibu Sasi dan Ibu Dina selaku Perwakilan Direktorat Eropa 1, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
9. Seluruh nama yang peneliti cantumkan sebagai sitasi, atas kontribusi dalam melengkapi dan mendukung data-data penelitian ini;
10. Ayah, Ibu (Almh), Bunda, dan ketiga kakak peneliti atas pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan dengan penuh kasih sayang dan ketulusan sejak kecil hingga kini, menjadi tempat terpercaya untuk meminta saran, serta menumpahkan segala cerita bahagia maupun keluh kesah. Selalu hadir, mendukung dan mengupayakan yang terbaik di setiap keputusan yang peneliti ambil sembari tanpa henti memberi doa, nasihat, maupun bantuan dalam bentuk apapun, tidak hanya secara finansial;
11. Hayyu, Fita, Basa, Hani, Bimo, Dennis, Divya, Manda, Nana, Sulis, Viana, Vladimir, dan Yoga yang telah menemani, menjadi sumber tawa, hiburan, informasi, bantuan, dan motivasi, sekaligus menjadi tempat berbagi cerita selama masa perkuliahan;
12. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2019, atas kebersamaan yang terjalin selama ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2025

Renda Lintang Gintawangi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teoretis	14
2.2.1 Teori Paradiplomasi.....	14
2.2.2 Pendidikan Inklusif.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya	30
4.1.1 Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya.....	31
4.1.2 Proses Identifikasi dan Asesmen	34
4.1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana.....	36
4.1.4 Sumber Daya Pendukung	41

4.1.5	Mitra Kolaborasi di Tingkat Lokal	44
4.2	Paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada Bidang Pendidikan Inklusif Tahun 2017–2022	46
4.2.1	Tujuan dan Motivasi	48
4.2.2	Sumber Daya	55
4.2.2.1	Sumber Daya Finansial	57
4.2.2.2	Sumber Daya Manusia	59
4.2.3	Tingkat Partisipasi	61
4.2.3.1	Pranegosiasi	63
4.2.3.2	Negosiasi	67
4.2.3.3	Pascanegosiasi	71
4.2.4	Strategi	79
V.	SIMPULAN DAN SARAN	83
5.1	Simpulan	83
5.2	Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah anak berkebutuhan khusus usia sekolah di Surabaya tahun 2017.....	49
2. Pedoman wawancara Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya	96
3. Pedoman wawancara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	98
4. Transkrip wawancara Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya...	100
5. Transkrip wawancara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.....	115
6. Hasil <i>coding</i> wawancara Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya.....	128
7. Hasil <i>coding</i> wawancara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tingkat bersekolah anak penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas berusia 7-18 tahun pada tahun 2021	2
2. Perbandingan jumlah sekolah tingkat SD dan SMP dengan sekolah inklusi per kecamatan di Kota Surabaya	4
3. Hasil pemetaan dalam bentuk <i>network visualization</i> oleh VOSviewer	10
4. Kerangka Pemikiran.....	21
5. Proses identifikasi dan asesmen pada peserta didik berkebutuhan khusus	35
6. Pengadaan <i>parallel bar</i> dan <i>ramp</i> di SMP Negeri 28 Kota Surabaya	38
7. Proses pembelajaran di ruang sumber.....	40
8. Kunjungan Wakil Wali Kota Liverpool ke Surabaya	64
9. Tri Rismaharini dan Wali Kota Liverpool, Joe Anderson ketika menandatangani <i>Letter of Intent</i> (LoI)	65
10. Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) oleh Wali Kota Surabaya dan Liverpool.	71
11. Kunjungan Duta Besar Inggris untuk membahas program pengiriman delegasi ke St. Vincent's School di Liverpool.....	73
12. Pengenalan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan seni di St. Vincent's School	74
13. Alat bantu belajar di dalam Sightbox.....	75
14. Pelaksanaan seminar <i>online</i> "Assessment and Teaching Methods for Visually Impaired Pupils".....	77
15. .Dokumentasi wawancara Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya.....	137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Pedoman Wawancara.....	96
B. Transkrip Wawancara	100
C. Hasil <i>Coding</i> Wawancara.....	128
D. Dokumentasi Wawancara	137

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Berkebutuhan Khusus
CRPD	: <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
Dispendik	: Dinas Pendidikan
Dit. HP Sosbud	: Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
Ditjen HPI	: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
GPK	: Guru Pembimbing Khusus
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LoI	: <i>Letter of Intent</i>
LPT	: Lembaga Pemberdayaan Tunanetra
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PDBK	: Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>

I. PENDAHULUAN

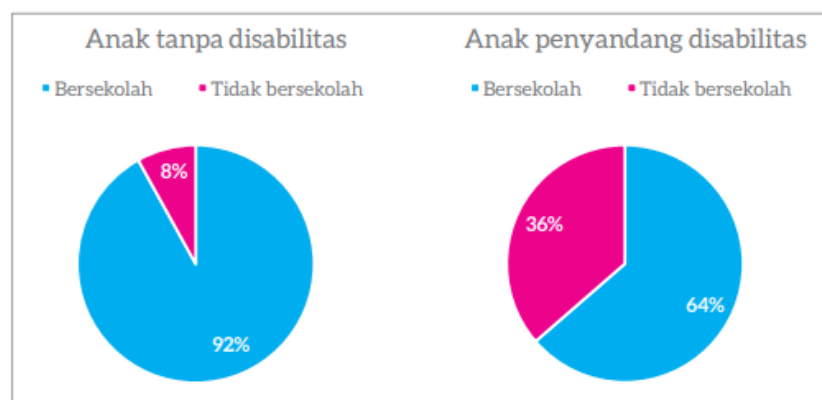
Penelitian ini menganalisis paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022. Penelitian ini penting dilakukan mengingat paradiplomasi semakin menjadi sarana bagi pemerintah subnasional untuk menangani tantangan domestik. Surabaya, dengan prestasi-prestasi yang telah diraih, masih menghadapi kendala besar pada penyelenggaraan pendidikan inklusifnya. Surabaya menunjukkan kemampuan untuk bertindak di arena internasional dengan menjalin kerja sama secara subnasional bersama Liverpool guna mengatasi masalah tersebut, yang menjadikannya contoh relevan dalam studi paradiplomasi. Bab ini menyajikan uraian latar belakang diikuti dengan pemaparan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian untuk memberi justifikasi yang jelas dan membangun fondasi terstruktur bagi keseluruhan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan terus berkembangnya pendidikan global, perhatian terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keberagaman semakin mengalami peningkatan yang signifikan hingga memfasilitasi pergeseran sistem pendidikan ke arah yang lebih inklusif. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan ialah hak dasar setiap orang. Kendati demikian, masih ada kelompok yang rentan menjadi korban eksklusi dalam mengenyam pendidikan berkualitas, yaitu mereka yang menjadi bagian dari anak berkebutuhan khusus (ABK). Bahkan sering kali mereka membutuhkan dukungan ekstra atau “perlakuan istimewa” agar dapat menikmati hak-hak mereka seutuhnya (A. W. Putri, 2022). Oleh karena itu, pendidikan

inklusif hadir sebagai agenda transformasi pendidikan dunia untuk merespons keberagaman kebutuhan peserta didik melalui penghapusan segala bentuk eksklusi yang menghalangi akses mereka untuk berpartisipasi pada bidang pendidikan sekaligus merefleksikan tujuan gagasan Education for All (UNESCO, 2015).

Indonesia menjadi satu dari sekian banyak negara yang telah mengimplementasikan pendidikan inklusif. Pada tingkat nasional, Indonesia menekankan komitmennya terhadap pemenuhan hak ABK dalam bidang pendidikan melalui disahkannya Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang secara eksplisit mengatur tentang pendidikan inklusif (Hafiz, 2017), beserta beberapa Undang-Undang lain. Upaya pencegahan diskriminasi bagi ABK pada sistem pendidikan sejatinya juga termaktub dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang Indonesia ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pendidikan inklusif diwujudkan Indonesia dengan menggunakan model integrasi yang menggabungkan proses pembelajaran ABK bersama peserta didik lainnya di dalam sekolah reguler atau yang dikenal dengan sebutan sekolah inklusi (Hafiz, 2017). Alhasil, sekolah inklusi mampu menjadi alternatif di samping sekolah luar biasa untuk ABK mendapatkan pendidikan.



Gambar 1. Tingkat bersekolah anak penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas berusia 7-18 tahun pada tahun 2021.

Sumber: UNICEF Indonesia (2023)

Sayangnya, masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang menghadapi kesulitan untuk mengakses sekolah inklusi maupun memanfaatkan

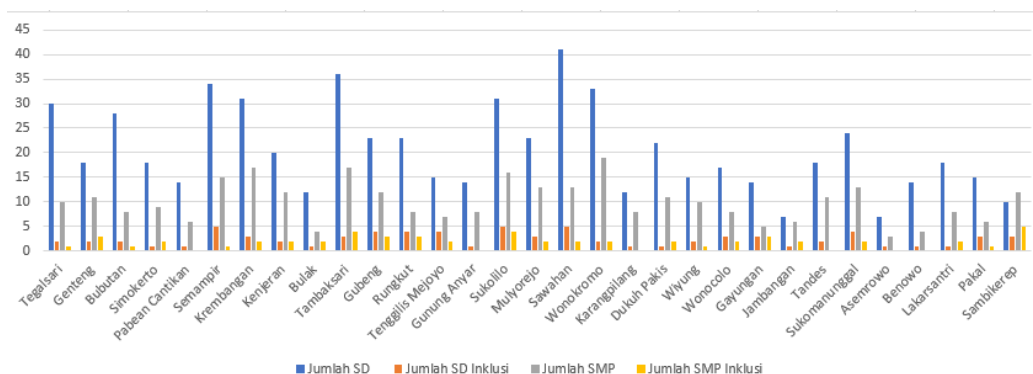
secara langsung pemberlakuan pendidikan inklusif. Pada tahun 2018, jumlah ABK berusia 5-19 tahun di Indonesia mencapai 2,2 juta atau sekitar 3,3% anak di Indonesia memiliki disabilitas (A. W. Putri, 2022). Walau jumlah sekolah inklusi bertambah setiap tahunnya, ABK masih mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mengakses pendidikan. Indonesia termasuk salah satu negara dengan *attendance gap* tertinggi di mana terdapat 36% ABK yang tidak bersekolah, sedangkan anak tanpa disabilitas yang tidak bersekolah hanya sebesar 8% (Mizunoya *et al.*, 2018; UNICEF Indonesia, 2023). Selain itu, anak berkebutuhan khusus juga memiliki tingkat kelulusan yang rendah sebab sekitar 24,04% dari mereka yang bersekolah bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar (Hata dkk., 2021).

Sepanjang perjalanannya, berbagai kendala membuat pendidikan inklusif di Indonesia belum terselenggara dengan optimal. Diawali dengan jumlah dan lokasi sekolah inklusi yang susah untuk dijangkau ABK di seluruh daerah (Suhendri, 2020). Beberapa sekolah inklusi di Indonesia pun dinilai tidak berhasil mengikuti standar pedoman nasional terkait pendidikan inklusif (UNICEF Indonesia, 2023). Hal ini semakin diperparah dengan mekanisme pengawasan oleh pemerintah yang kurang memadai dan mengakibatkan pemenuhan kebutuhan pembelajaran ABK maupun masalah putus sekolah yang dialami ABK menjadi terabaikan. Keterbatasan dari segi kuantitas dan kapabilitas guru pembimbing khusus (GPK) turut menghalangi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sebagaimana hanya tersedia 3.652 GPK, jumlah tersebut kurang cukup untuk menjawab kebutuhan 28.778 sekolah inklusi (Hata dkk., 2021).

Realita ini menyoroti kompleksitas pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia yang memerlukan upaya kolaboratif di antara semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah subnasional, sampai masyarakat demi menjamin terpenuhinya kesejahteraan ABK. Namun, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa lemahnya keseriusan pada level subnasional ialah penghambat dalam realisasi pendidikan inklusif (UNICEF Indonesia, 2023). Atas persoalan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun mengimbau pemerintah subnasional agar terus berkomitmen untuk menjamin pengembangan mutu dan

pemerataan akses layanan pendidikan inklusif bagi ABK (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Pendidikan inklusif telah diterapkan secara lebih luas di berbagai wilayah di tanah air. Hingga tahun 2015, 48 kabupaten/kota tercatat sudah menjalankan pendidikan inklusif (Mulyadi, 2017). Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah lama gigih memperjuangkan terwujudnya lingkungan pendidikan yang inklusif sejak tahun 2008 silam. Pemerintah Kota Surabaya juga menetapkan agenda-agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya (RPJMD) dengan mengadopsi salah satu poin Sustainable Development Goals, ialah memastikan pemerataan kualitas pendidikan yang inklusif untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang. Bahkan Surabaya sukses mendapat Inklusi Awards pada tahun 2014 dan UNESCO Learning City Awards pada tahun 2017 (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2014; Effendi, 2017). Surabaya pun kemudian terpilih sebagai percontohan bagi daerah lain di Jawa Timur sebab dipandang telah berhasil merealisasikan pendidikan inklusif (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2014a).



Gambar 2. Perbandingan jumlah sekolah tingkat SD dan SMP dengan sekolah inklusi per kecamatan di Kota Surabaya.

Sumber: Hasil olah peneliti bersumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (2022)

Berdasarkan data-data yang terkumpul, implementasi pendidikan inklusif di Kota Surabaya justru menunjukkan realita sebaliknya. Pendidikan inklusif di Surabaya tampaknya belum berjalan dengan baik karena masih dihindangi beberapa masalah yang tak kunjung teratasi. Dinas Pendidikan Kota Surabaya pun

mengutarakan ketidaksiapan untuk memfasilitasi kebutuhan ABK pada setiap satuan pendidikan formal (Mohammad & Dofir, 2023). Pertama, dalam hal aksesibilitas akibat penerapan sekolah inklusi di Kota Surabaya masih belum merata. Pada gambar di atas, dapat terlihat adanya ketidakseimbangan antara jumlah sekolah tingkat SD dan SMP dengan jumlah sekolah inklusi pada tingkat yang sama di Surabaya. Pasal 4 Permendiknas No. 70 tahun 2009 mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota menunjuk setidaknya satu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di setiap kecamatan untuk menerapkan pendidikan inklusif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Tetapi masih ada beberapa kecamatan di Surabaya yang belum memiliki SMP inklusi, seperti Kecamatan Pabean Cantikan, Gunung Anyar, Karangpilang, Tandes, Asemrowo, dan Benowo. Bahkan menurut Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Surabaya, Munaiyah, daya tampung sekolah inklusi di Surabaya tergolong kecil, yakni hanya sebesar 10% (Mohammad & Dofir, 2023). Masalah aksesibilitas pada sekolah inklusi di Surabaya berakar dari minimnya anggaran pemerintah diiringi minimnya kesiapan sekolah yang terpilih sebagai sekolah inklusi.

Kedua, dalam hal keterbatasan kapabilitas yang dikuasai Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, jumlah GPK di sekolah inklusi yang belum bisa mengimbangi peningkatan angka peserta didik berkebutuhan khusus yang semakin banyak. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh bahwa sebagian besar sekolah inklusi belum dilengkapi dengan GPK untuk menunjang kegiatan pembelajaran bagi ABK (Pemerintah Kota Surabaya, 2024). Sedangkan menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, setiap satuan pendidikan diharuskan memiliki setidaknya satu GPK (Ediyanto dkk., 2021).

Ketiga, sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah inklusi yang menurut Tutus Setiawan, selaku Pendiri Lembaga Pemberdayaan Tunanetra (LPT), belum mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas dengan baik (Melani, 2019). Padahal pemenuhan fasilitas pembelajaran, seperti media atau alat peraga diperlukan untuk memudahkan proses pengajaran pada pelaksanaan pendidikan inklusif dan ketersediaan fasilitas

tersebut sudah sepatutnya disesuaikan berdasarkan jenis disabilitas masing-masing peserta didik (Agustina & Rahaju, 2021). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim dan Furnamasari (2023) bahwa masih terdapat sekolah inklusi di Kota Surabaya yang belum diberi bantuan fasilitas oleh pemerintah.

Surabaya mulai menjalin kerja sama untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan pada bidang pendidikan inklusif seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusifitas dalam pendidikan demi memberi kesetaraan peluang bagi semua individu untuk mengakses pendidikan, tidak terkecuali mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Paradiplomasi dengan Liverpool termasuk upaya eksternal Pemerintah Kota Surabaya untuk menanggapi isu pendidikan inklusif tersebut. Liverpool mempunyai potensi besar dalam bidang pendidikan inklusif. Kemajuan pada kualitas metode pembelajaran dan alat bantu belajar (*assistive technology*) yang dimiliki oleh Liverpool serta keseriusannya dalam bidang pendidikan inklusif yang dituangkan melalui kebijakan, investasi, dan peluncuran program-programnya menjadi daya tarik tersendiri bagi Surabaya untuk menggandeng Liverpool sebagai mitra. Di sisi lain, Surabaya juga merupakan kota yang potensial, apabila merujuk pada prestasi yang diraihinya di sektor pendidikan inklusif. Lebih lanjut, persamaan komitmen keduanya terhadap pendidikan inklusif, serta didukung kemampuan bernyanyi dan memainkan piano dari salah satu peserta didik berkebutuhan khusus, berhasil menyentuh hati Wali Kota Liverpool yang sekaligus membulatkan kesepakatan keduanya untuk menjalin paradiplomasi pada bidang pendidikan inklusif dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 19 Maret 2018 oleh Wali Kota Liverpool bersama Wali Kota Surabaya (Septaralinda, 2021).

Penelitian ini menganalisis paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool dalam mengembangkan kualitas pendidikan inklusif, terutama mengkaji aspek-aspek keterlibatan Kota Surabaya sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional melalui paradiplomasi tersebut, yang juga dikenal dengan istilah ‘international actorness’. Pemilihan topik pada penelitian ini mengikuti beberapa alasan. Pertama, terlepas dari prestasi dan statusnya sebagai kota

percontohan bagi daerah-daerah di Jawa Timur, nyatanya pendidikan inklusif di Surabaya sendiri belum terlaksana dengan sempurna. Kedua, merujuk pada adanya stereotip yang menyatakan bahwa fenomena paradiplomasi merupakan atribut negara federal (Kuznetsov, 2015). Ini dikarenakan literatur-literatur terdahulu tentang paradiplomasi cenderung berfokus pada pemerintah subnasional dalam sistem federal, dibanding negara-negara kesatuan (*unitary*). Walaupun begitu, Indonesia merupakan negara kesatuan yang pemerintah subnasionalnya semakin aktif terlibat dalam praktik paradiplomasi, salah satunya dibuktikan dengan Kota Surabaya (Mukti, 2020). Ketiga, meskipun kerja sama dengan mitra luar negeri melalui skema paradiplomasi bukanlah hal baru bagi Surabaya, namun topik tersebut belum digali secara mendalam. Celah ini dapat diisi melalui penelusuran mengenai bagaimana Surabaya melakukan paradiplomasi dengan Liverpool. Sehingga, memahami aspek-aspek yang menunjang keterlibatan Surabaya pada paradiplomasi tersebut menjadi penting, khususnya untuk melihat peran aspek-aspek ini dalam menentukan sejauh mana paradiplomasi dengan Liverpool dapat diimplementasikan dengan lebih efektif guna mengatasi persoalan pendidikan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Surabaya, yang dijuluki sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia, memperoleh pengakuan atas kerja kerasnya menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menerima Inklusi Awards pada tahun 2014 dan terpilih sebagai kota percontohan bagi daerah lain di Jawa Timur karena dianggap berhasil dalam memajukan mutu pendidikan inklusifnya. Secara lokal, kota ini telah menempuh pelbagai langkah untuk mengakomodasi kebutuhan belajar ABK, seperti menyediakan sekolah inklusi, mengintegrasikan ABK ke dalam kelas reguler, serta menyediakan GPK dan fasilitas belajar. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidakmerataan terhadap persebaran sekolah inklusi di setiap wilayah Surabaya, fasilitas belajar yang kurang memadai, peningkatan infrastruktur yang juga tidak merata pada seluruh sekolah inklusi, dan kompetensi yang terbatas di antara para tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar

ABK. Tantangan ini menyoroti bahwa upaya lokal saja kurang cukup untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan pendidikan inklusif. Sebagai tanggapan, Surabaya mencari dukungan eksternal melalui jalinan paradiplomasi bersama Liverpool, yaitu kota dengan rekam jejak pendidikan inklusif yang lebih maju, terutama dalam hal metode ajar, kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas belajar, maupun infrastruktur. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini mengusung pertanyaan penelitian berupa:

Bagaimana paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya; dan
2. Menganalisis paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan internasional, terlebih pada kajian seputar paradiplomasi dan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengangkat topik penelitian serupa.

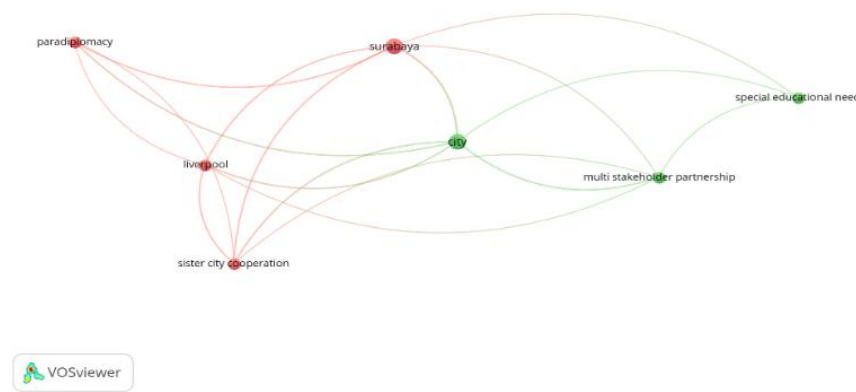
II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tinjauan peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk menemukan *gap* penelitian. Bagian kedua berisi penjelasan seputar teori yang digunakan sebagai instrumen untuk membantu peneliti menganalisis fenomena yang menjadi topik penelitian ini, meliputi konsep pendidikan inklusif disertai teori paradiplomasi dengan mengadopsi empat kriteria *international actorness* pemerintah subnasional milik Brian Hocking: tujuan dan motivasi, sumber daya, tingkat partisipasi, dan strategi. Bagian ketiga, yaitu kerangka pemikiran yang memberikan ilustrasi atas alur penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan prasyarat dalam setiap penelitian ilmiah (Pedada, 2023). Oleh karena itu, penyusunan penelitian ini pula diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang diteliti sebagai fondasi dalam melaksanakan penelitian, terutama untuk membantu peneliti agar mampu sepenuhnya memahami topik penelitian, membuat perbandingan antara penelitian, maupun mempermudah proses pemilihan teori atau konsep yang digunakan. Kendati demikian, eksistensi penelitian terdahulu yang mengusung topik terkait praktik paradiplomasi Surabaya-Liverpool pada bidang pendidikan inklusif masih terbatas, di mana penelitian-penelitian lainnya yang bersinggungan sekaligus memiliki korelasi dengan topik tersebut lebih menekankan tentang kegiatan yang dilakukan Surabaya-Liverpool dalam

meningkatkan kualitas pendidikan inklusif (Rimapradesi & Latief, 2023; Septaralinda, 2021). Terdapat pula penelitian yang menunjukkan peranan *multistakeholder partnership* dalam kerja sama Surabaya-Liverpool pada pendidikan inklusif (Putro dkk., 2023). Beberapa penelitian lain membahas latar belakang kerja sama *sister city* Surabaya-Liverpool secara umum (Putranto, 2019), serta kebijakan pendidikan inklusif di Surabaya (Pramudiana, 2017; Rosari *et al.*, 2023).



Gambar 3. Hasil pemetaan dalam bentuk *network visualization* oleh VOSviewer.
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pembuktian atas kebaruan penelitian ini selanjutnya ditempuh dengan mengandalkan penggunaan dua perangkat lunak bernama Publish or Perish dan VOSviewer. Kedua perangkat lunak tersebut juga digunakan peneliti untuk mencari *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulunya yang relevan dengan paradiplomasi, khususnya yang dijalankan oleh Kota Surabaya. Publish or Perish sendiri berperan sebagai alat panen metadata dari literatur atau referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti memasukkan *keyword* berupa Surabaya, Liverpool, *sister city*, pendidikan inklusif, paradiplomasi, dan *special educational needs*. Peneliti juga membatasi periode publikasi penelitian yang dimulai pada tahun 2017, yaitu tahun ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) kerja sama *sister city* antara Surabaya-Liverpool hingga tahun 2024. Sedangkan, VOSviewer berperan untuk memetakan sekaligus

membuat visualisasi atas data yang dihasilkan oleh Publish or Perish. Berdasarkan *network visualization* dari VOSviewer di atas, penelitian yang secara spesifik menganalisis *international actorness* Kota Surabaya dalam paradiplomasi dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tidak ditemukan. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji paradiplomasi Surabaya-Liverpool, namun belum mencakup penelusuran terkait aspek-aspek pendukung yang berkaitan dengan keterlibatan Kota Surabaya sebagai pelaku hubungan internasional dalam paradiplomasi bersama Liverpool, terutama untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, terbuka peluang bagi penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, Prasetyo, Musaddad, Pramestya, dan Lestari untuk menganalisis sepuluh dimensi dan peran keempat aktor *sound governance* dalam kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool di bidang olahraga dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (Adalatul Hikmah dkk., 2022). Data dalam penelitian tersebut dihimpun dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan, hingga dokumentasi. Berdasarkan temuan dari penelitian tersebut diketahui bahwa kerja sama *sister city* Surabaya-Liverpool di bidang olahraga ini telah memenuhi seluruh dimensi *sound governance* terutama dengan disepakatinya *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai wujud keseriusan pemerintah kedua kota yang juga direfleksikan melalui kontribusi aktif aktor-aktor *sound governance*, kecuali pihak swasta, dalam pelaksanaannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yahya, Nursita, dan Kohar (Yahya dkk., 2023). Penelitian ini didasarkan pada hubungan kerja sama antara Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Bukhara di bidang pariwisata halal yang hanya sampai pada tahap penandatanganan LoI saja dan tidak kunjung mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, para peneliti berfokus menelusuri tantangan yang muncul dalam proses institusionalisasi paradiplomasi antara NTB dan Bukhara sembari menggunakan konsep paradiplomasi sebagai alat analisis. Studi kepustakaan dan wawancara menjadi cara yang dipilih peneliti dalam mengumpulkan data dengan turut menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk

menghasilkan temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa terhambatnya proses institusionalisasi paradiplomasi NTB-Bukhara disebabkan oleh perubahan kepemimpinan dan arah kebijakan pemerintah NTB, keterbatasan pemahaman pemerintah daerah tentang kerja sama internasional, regulasi pemerintah pusat yang belum sepenuhnya mendukung, serta pemahaman yang berbeda antara NTB dan Bukhara terhadap pariwisata halal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, Hakiki, dan Rubiyanto (Fitriana dkk., 2022). Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, para peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dampak dari pelaksanaan kerja sama Surabaya-Kitakyushu di bidang lingkungan, khususnya pada program Surabaya Green City. Kerja sama ini muncul akibat status Surabaya yang termasuk ke dalam salah satu daerah dengan pencemaran lingkungan tertinggi di Jawa Timur. Para peneliti juga mengaplikasikan teori *green paradiplomacy* maupun konsep *sister city* sehingga diketahui bahwa kerja sama tersebut telah menghasilkan dampak positif bagi Kota Surabaya, di antaranya yaitu terdapat semakin banyak ruang terbuka hijau di sepanjang jalan Kota Surabaya sekaligus menjadikan Surabaya sebagai salah satu kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia.

Keempat, penelitian oleh Al-Gifari, Kusumo, dan Rahayu yang melakukan analisis terhadap kerja sama antara Surabaya dan Liverpool dari sisi hukum (Al-Gifari dkk., 2024). Lebih lanjut, para peneliti berusaha menjawab pertanyaan penelitian tentang kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam membuat perjanjian internasional *sister city*, serta mengkaji kekuatan dan kedudukan MoU dari perspektif hukum internasional. Data yang dipaparkan pada penelitian ini bersumber dari studi literatur. Para peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif sekaligus menganalisisnya dengan konsep *international agreement* dan paradiplomasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional *sister city* dalam pelaksanaan paradiplomasi bersama Liverpool. Selain itu, perjanjian internasional *sister city* antara Surabaya dengan Liverpool yang diwujudkan dalam bentuk MoU tersebut memiliki kedudukan yang sah menurut hukum

internasional dan dikategorikan sebagai *treaty contract* yang hanya akan menimbulkan hukum bagi pihak yang membuatnya, di mana dalam kasus ini ialah Surabaya dan Liverpool.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nuryananda, Firdaus, dan Elifansyah yang mengusung studi kasus tentang pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Liverpool (Nuryananda dkk., 2018). Teknik studi literatur serta metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Para peneliti mencoba mencari tahu upaya yang dilakukan Inggris untuk meminimalisir kerugian ekonomi pasca Brexit dengan mencari keuntungan dari kerja sama yang dijalinnya bersama negara-negara Asia, termasuk Indonesia sambil menganalisisnya menggunakan konsep paradiplomasi, *sister city*, dan kerja sama bilateral. Maka didapatkan hasil bahwa setelah Brexit, Inggris gencar melakukan kerja sama berbasis ekonomi dan perdagangan dengan beberapa negara Asia, meliputi peningkatan aktivitas ekspor-impor hingga paradiplomasi. Salah satu praktik paradiplomasi yang dijalankan adalah antara Liverpool dan Surabaya dengan membuka England's Visa Application Center di Surabaya untuk membantu pertumbuhan pada sektor ekonomi kedua negara.

Terlepas sama-sama mengusung tema penelitian tentang kerja sama antara dua kota, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti jalankan, yaitu dalam hal substansi, teori, maupun fokus penelitian. Penelitian ini memaparkan aspek-aspek keterlibatan Surabaya (*international actorness*) dalam paradiplomasi dengan Liverpool sebagai upaya mengembangkan pendidikan inklusifnya. Konsep pendidikan inklusif digunakan sebagai alat analisis di samping penggunaan teori paradiplomasi, meskipun pada penelitian ini lebih menekankan pada empat aspek *international actorness* pemerintah subnasional yang digagas oleh Brian Hocking. Sementara itu, persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif disertai pemilihan wawancara maupun studi literatur sebagai teknik pengumpulan data.

2.2 Landasan Teoretis

2.2.1 Teori Paradiplomasi

Fenomena paradiplomasi mengisyaratkan terjadinya perluasan ruang lingkup diplomasi, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor. Globalisasi secara tidak langsung telah menarik masuk aktor maupun isu baru ke dalam hubungan internasional, dan pada saat yang bersamaan juga mengubah pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional (Keating, 2013). Hal tersebut kemudian memengaruhi motivasi pemerintah daerah untuk belajar beradaptasi dengan tatanan baru seraya menciptakan kebutuhan untuk bekerja sama dengan mitra luar negeri dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat sebelum melaksanakan paradiplomasi identik dengan diawali penandatanganan dokumen *Letter of Intent* (LoI) dan juga MoU yang secara umum diakui mengikat, namun tidak memiliki klaim hukum atas hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya (Tavares, 2016).

Definisi dari istilah paradiplomasi sendiri sejatinya bervariasi dalam berbagai literatur. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Noé Cornago (2000), ia mengartikan paradiplomasi sebagai keikutsertaan pemerintah non-pusat dalam hubungan internasional dengan menjalin koneksi bersama entitas publik atau swasta asing dalam rangka memecahkan isu-isu sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Sedangkan, menurut Inaki Aguirre (2013), paradiplomasi adalah keterlibatan aktor non-negara dalam aktivitas internasional. Aktor non-negara yang ia maksud dalam konteks tersebut mengacu pada pemerintah daerah, *non-governmental organization* (NGO), masyarakat sipil, perusahaan transnasional, komunitas keagamaan, seniman, ilmuwan, dan lain-lain.

Istilah paradiplomasi sebagai wacana akademik, secara historis diperkenalkan melalui dua peristiwa penting. Pertama, Rohan Butler, menulis bab dengan judul “Paradiplomacy” dalam buku *Studies in Diplomatic History and Historiography* pada tahun 1961 sebagai upaya pertama memasukkan istilah

paradiplomasi ke dalam literatur ilmu sosial (Kuznetsov, 2015). Upaya berikutnya dapat ditemui pada artikel yang diterbitkan tahun 1984 oleh Ivo Duchacek dengan judul *The International Dimension of Subnational Self-Governments* yang dimuat dalam jurnal ilmiah *Publius*. Awalnya, Duchacek lebih dulu menggunakan istilah ‘mikrodiplomasi’ untuk menggambarkan kegiatan eksternal pemerintah subnasional. Akan tetapi, melalui sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1990, Duchacek mengakui bahwa penggunaan istilah “paradiplomasi” yang diusulkan serta dikembangkan oleh Panayotis Soldatos lebih mendukung untuk menjelaskan keterlibatan pemerintah subnasional dalam hubungan internasional (Kuznetsov, 2015). Makna inilah yang hingga kini digunakan secara luas untuk menjelaskan istilah paradiplomasi. Peristiwa penting kedua ialah konferensi *The Provinces and Canadian Foreign Policy* yang diselenggarakan pada tahun 1985 oleh *The Canadian Institute of International Affairs* di Universitas Alberta (Kuznetsov, 2015). Konferensi tersebut sekaligus menandakan pertemuan akademis dan praktisi pertama yang didedikasikan untuk membahas seputar paradiplomasi.

Keterlibatan pemerintah subnasional dalam menjalin hubungan luar negeri umumnya tertuju pada kepentingan ataupun motif tertentu yang ingin diraih. Motif ini cukup beragam mulai dari alasan ekonomi, budaya, politik, sampai sebuah alasan yang disebut *cross-border housekeeping* oleh John Kincaid meliputi alasan lingkungan, transportasi, pendidikan, migrasi, dan sebagainya (Kuznetsov, 2015). Oleh sebab itu, paradiplomasi harus dilihat sebagai kebutuhan sekaligus peluang yang bisa membantu proses penyelesaian suatu isu. Pernyataan serupa juga disampaikan *Council of European Municipalities and Regions (CEMR)* (2004), bahwa kerja sama antarkota dapat berfungsi sebagai wadah bagi pihak-pihak yang bekerjasama untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan saling membantu dalam mencari solusi saat dihadapkan pada suatu masalah. Terkadang, aktor subnasional di negara maju menjadikan paradiplomasi sebagai kesempatan untuk membantu proses pembangunan di kota lain (Lecours, 2008).

Dimensi ‘actorness’ pada pemerintah subnasional sebagai pelaku hubungan internasional dapat pula dipelajari sekaligus dianalisis seperti halnya entitas lain, termasuk dalam suatu praktik paradiplomasi. *Actorness* berarti kemampuan suatu entitas untuk berpartisipasi secara aktif dengan aktor lain dalam

sistem internasional (Sjöstedt, 1977). Terdapat dua aspek penting untuk memahami *actorness*, yaitu *actor capability* dan *actor behavior* (Sjöstedt, 1977). Adapun tiga komponen dasar dari *actor capability* adalah kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan dan memobilisasi sumber daya, kemampuan untuk membuat keputusan, serta mempunyai jaringan pelaksana untuk mengimplementasikan keputusan tersebut secara efektif. Di sisi lain, *actor behavior* lebih mengacu pada bagaimana *actor capability* dipraktikkan dalam situasi yang nyata. *Actor behavior* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *diplomatic interaction* dan *exchange interaction*.

Brian Hocking memberi kontribusi yang signifikan pada kajian paradiplomasi dengan memperkenalkan konsep *international actorness* sebagai terobosan kerangka analisis untuk kegiatan paradiplomasi yang dilakukan pemerintah subnasional. Hocking (1999) menetapkan aspek-aspek *international actorness*, meliputi: (1) tujuan dan motivasi, (2) sumber daya, (3) tingkat partisipasi, dan (4) strategi. Demi membantu pemahaman mendalam perihal keterlibatan pemerintah subnasional dalam hubungan internasional, ia berpendapat bahwa seluruh aspek tersebut harus ditelusuri dari lingkup internal dan eksternal (Hocking, 1999).

1. Tujuan dan Motivasi

Kriteria ini mengeksplorasi tujuan mendasar yang mendorong pemerintah subnasional untuk terlibat di panggung internasional. Tujuan yang melatarbelakangi partisipasi pemerintah subnasional ini beragam dan terkadang spesifik pada bidang tertentu, umumnya berakar pada alasan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan adanya globalisasi ekonomi yang seakan memaksa pemerintah subnasional untuk menyeimbangkan prioritas lokal dan peluang global dengan mengejar kemitraan luar negeri sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun ketahanan terhadap ketidakpastian pasar global (Hocking, 1999). Bahkan, fakta bahwa semakin pentingnya pengetahuan dalam pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan perbedaan antara tujuan sosial dan ekonomi. Namun, Hocking menyoroti bahwa motivasi keterlibatan pemerintah subnasional juga dapat berkisar dari tujuan politik, lingkungan, budaya, hingga pendidikan. Seperti

yang telah dicatat oleh Gertler dan Wolfe (1997), pemerintah daerahlah yang sering kali menjadi aktor penting dalam bidang pendidikan.

Lebih lanjut, Hocking (1999) menjelaskan beberapa cara berbeda yang digunakan pemerintah subnasional untuk berinteraksi dengan aktor lain di panggung internasional. Pertama, sebagai *purposive actors* yang secara aktif dan independen berusaha meraih tujuan atau kepentingan lokal mereka sendiri di luar lingkungan nasional. Kedua, sebagai perantara bagi aktor lain, seperti NGO, untuk membantu mereka mencapai panggung global sehingga mereka mampu menyuarakan perhatian terhadap berbagai isu, terutama perubahan iklim atau hak asasi manusia. Singkatnya, pemerintah subnasional dapat bertindak secara internasional dengan mendorong agenda pribadi atau mendukung tujuan pihak lain.

2. Sumber Daya

Bagi Hocking (1993), kemampuan pemerintah subnasional untuk secara aktif terlibat pada hubungan internasional dibentuk oleh sumber daya yang dimiliki, sebab kelak dapat mereka mobilisasi demi mengejar kepentingan yang berfokus pada kebutuhan lokal mereka sendiri. Sumber daya ini mempunyai bentuk yang beragam, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tak berwujud (*intangible*). Sehingga, sumber daya yang dimaksud dalam konteks tersebut tidak selalu diukur hanya dalam bentuk kekuatan finansial, melainkan dilengkapi dengan serangkaian sumber daya lain, seperti keahlian birokrasi, serta pengetahuan dan kemampuan di bidang tertentu yang mampu mendukung efektivitas keterlibatan mereka pada ranah internasional. Sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah subnasional dalam mengembangkan mekanisme kerja sama internasional ialah akses mereka terhadap jaringan diplomatik pemerintah nasional yang memungkinkan mereka untuk bisa lebih mudah bertindak terhadap isu-isu internasional.

3. Tingkat Partisipasi

Hocking (1999) turut mengamati tingkat partisipasi pemerintah subnasional sebagai aktor paradiplomasi. Ia beranggapan bahwa efektivitas

keterlibatan pemerintah subnasional di panggung internasional tidak semata bergantung pada sumber daya yang tersedia, akan tetapi juga pada kemampuan mereka untuk membangun hubungan multilevel dan lintas sektor. Oleh karena itu, untuk benar-benar memahami bagaimana pemerintah subnasional beroperasi, Hocking menyarankan untuk menganalisis interaksi mereka dengan pemerintah di lingkup nasional maupun internasional. Partisipasi multilevel ini sekaligus menyoroti cara entitas subnasional terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses *agenda setting* pada tahap pranegosiasi, negosiasi, hingga tahap pascanegosiasi untuk mengimplementasikan kesepakatan (Hocking, 1993).

4. Strategi

Strategi mengacu pada jalur yang dipilih oleh pemerintah subnasional untuk membangun kehadiran di arena global dalam rangka mencapai tujuan mereka, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pemilihan strategi ini bergantung kepada kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki masing-masing pemerintah subnasional. Hocking (1999) membaginya menjadi dua strategi, yakni *primary strategy* dan *mediating strategy*. Pertama, *primary strategy* yang identik dengan tindakan langsung. Artinya, pemerintah subnasional mengerahkan sumber dayanya untuk mengambil inisiatif secara independen dalam menjalin hubungan internasional. Sebaliknya, *mediating strategy* mencerminkan tindakan tidak langsung pemerintah subnasional yang lebih mengandalkan akses yang ada untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional agar kepentingan mereka terwakili dalam kebijakan luar negeri pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah subnasional menggunakan pemerintah pusat sebagai perantara untuk membantu memperjuangkan kepentingan lokal mereka pada skala global.

Penelitian ini mengaplikasikan teori paradiplomasi, terutama mengadopsi empat kriteria *international actorness* pemerintah subnasional dalam paradiplomasi yang digagas oleh Brian Hocking. Teori paradiplomasi digunakan untuk memahami interaksi antara Surabaya dan Liverpool, sebagai entitas subnasional, dalam mencapai tujuan tertentu yaitu mengembangkan sekaligus mengatasi isu seputar pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan,

teori paradiplomasi menyediakan kerangka analisis yang spesifik membahas tentang peran yang dimainkan aktor non-negara, seperti pemerintah subnasional, dalam konteks hubungan internasional. Sehingga, dengan melakukan penelusuran terperinci terhadap tujuan, sumber daya, tingkat partisipasi, dan strategi, menjadi panduan yang memungkinkan peneliti agar mampu menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Selain itu, bisa pula memberi pemahaman seputar strategi Kota Surabaya dalam memanfaatkan kepentingan maupun kemampuannya dalam rangka menegaskan kontribusi dan statusnya sebagai aktor di arena global dengan berkolaborasi bersama Liverpool di bidang pendidikan inklusif.

2.2.2 Pendidikan Inklusif

Peneliti menggunakan konsep pendidikan inklusif untuk melihat upaya pemerintah Surabaya menjadikan inklusi bagian dari sistem pendidikan mereka, serta cara mereka mempersiapkan fasilitas maupun para tenaga pendidik agar bisa mengakomodasi kebutuhan belajar semua anak. Pendidikan inklusif sejatinya dilandasi prinsip-prinsip inklusi, pemerataan dan kesetaraan (UNESCO, 2017). Gidley *et al.*, (2010) menawarkan tiga cara untuk menjelaskan inklusi sosial. Interpretasi yang paling sempit dilihat dari perspektif neoliberal tentang inklusi sosial sebagai akses, interpretasi yang lebih luas dilihat dari perspektif keadilan sosial tentang inklusi sosial sebagai partisipasi, dan interpretasi yang paling luas dilihat dari perspektif potensi manusia tentang inklusi sosial sebagai pemberdayaan. Dengan demikian, pendidikan inklusif dipandang dapat memainkan peran penting sebagai salah satu cara promosi, perluasan, maupun mempertahankan inklusi sosial (UNESCO, 2017).

Dorongan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif secara masif digerakkan oleh Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus tahun 1994 dan menghasilkan the Salamanca Statement yang mengakui adanya perbedaan pada setiap anak sekaligus hak fundamental mereka untuk menerima pendidikan. Berdasarkan Pernyataan Salamanca, sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif

maupun membangun masyarakat yang ramah akan perbedaan (UNESCO, 1994). Seruan serupa juga digaungkan pada World Education Forum 2015 dengan terbitnya Deklarasi Incheon dan The Education 2030 Framework for Action agar setiap negara dapat memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif, adil, dan setara bagi semua (UNESCO, 2017).

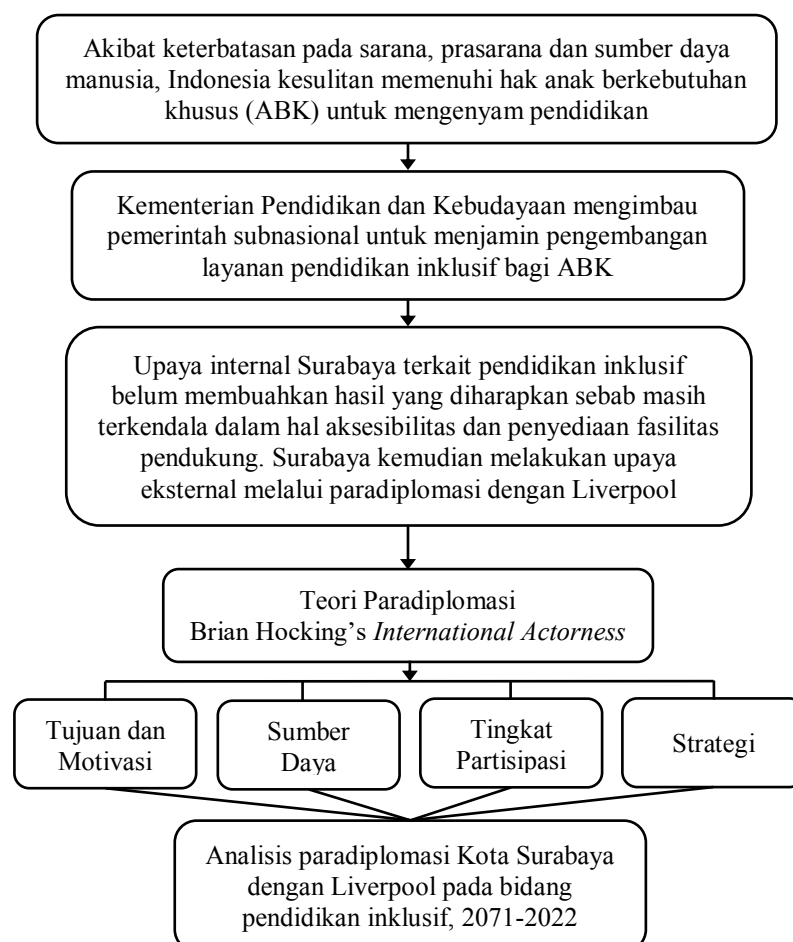
Pendidikan inklusif telah semakin berkembang menjadi pendekatan untuk menciptakan peluang pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dilansir dari (UNICEF, n.d.), pendidikan inklusif diwujudkan melalui penempatan anak-anak berkebutuhan khusus di ruang kelas dan sekolah yang sama dengan peserta didik lainnya. Hal yang sama pula diterapkan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya. Penyelenggaraan pendidikan semacam itu diyakini bisa membawa manfaat, baik untuk ABK maupun anak lainnya (UNICEF Indonesia, 2023). Oleh sebab itu, agar pendidikan inklusif terus berkelanjutan, penting bagi pemerintah pusat hingga daerah untuk memiliki komitmen yang jelas terhadap inklusi dan kesetaraan. Terdapat beberapa hal yang dianggap berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan inklusif, yaitu (Bindhani & Gopinath, 2024; Farrell & Ainscow, 2002; UNESCO, 2017):

1. Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan-kebijakannya dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
2. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan layanan pendukung yang memadai, sebab Farrell dan Ainscow (2002) berpendapat bahwa kurangnya sumber daya dan layanan pendukung yang memadai memicu munculnya tantangan terhadap penerapan pendidikan inklusif. Sumber daya yang dibutuhkan ialah guru pembimbing khusus, finansial, pengembangan kurikulum pembelajaran yang sesuai, serta menyediakan infrastruktur maupun akses ke layanan khusus, seperti *assistive technology* dan terapi yang penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan belajar bagi murid berkebutuhan khusus.
3. Pemerintah perlu melakukan advokasi dan sosialisasi demi mempromosikan sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai manfaat

pendidikan inklusif secara luas dengan tujuan memantik dukungan dari masyarakat dan pihak lain.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berfungsi untuk memvisualisasikan alur penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022. Kerangka ini sekaligus memberi ilustrasi atas kondisi dan kendala yang dihadapi Indonesia maupun Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif hingga membuat Surabaya mencari dukungan eksternal dengan menjalin paradiplomasi bersama Liverpool, serta penggunaan konsep *international actorness* oleh Brian Hocking dalam teori paradiplomasi untuk menganalisis tujuan dan motivasi, sumber daya, tingkat partisipasi, maupun strategi Surabaya pada paradiplomasi tersebut.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian metodologi yang digunakan peneliti dalam menganalisis paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022. Tujuan utama dari bab ini ialah untuk menyajikan rincian jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, serta data-data yang berasal dari dokumen resmi, media sosial, portal berita, publikasi akademik, dan hasil wawancara bersama beberapa narasumber dengan mengandalkan studi literatur dan wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data untuk memberi informasi yang sesuai terhadap tujuan penelitian. Bab ini ditutup dengan penjelasan teknik analisis data mengikuti prosedur yang disarankan oleh Miles *et al.* (2014), mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menyusun penelitian ini. Menurut Creswell (2007), penelitian kualitatif lebih difokuskan pada eksplorasi dan usaha memperdalam pemahaman tentang cara pandang individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Sehingga, keputusan menggunakan pendekatan kualitatif dibuat karena penelitian ini berusaha menganalisis interaksi eksternal Kota Surabaya dengan Liverpool sekaligus untuk memperluas pemahaman seputar kajian paradiplomasi, yang termasuk salah satu bentuk fenomena sosial dalam lingkup ilmu hubungan

internasional. Selain itu, Kuznetsov (2015) pula menjelaskan bahwa dibandingkan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif lebih banyak digunakan pada penelitian mengenai paradiplomasi. Ini diakibatkan oleh sulitnya menciptakan indeks kuantitatif yang jelas terkait paradiplomasi ataupun untuk mengukur kinerjanya. Penelitian kualitatif juga menggunakan lensa teoritis untuk menganalisis suatu fenomena. Sehingga pada penelitian ini, teori paradiplomasi diaplikasikan guna membantu peneliti dalam memecahkan masalah penelitian.

Prosedur penelitian kualitatif dijelaskan Bryman (2012) melibatkan perumusan pertanyaan penelitian, pemilihan situs dan subjek yang relevan, pengumpulan data, interpretasi data, penerapan teori dan konsep, serta penulisan temuan dan kesimpulan. Mengacu pada prosedur tersebut, maka pelaksanaan penelitian ini diawali dengan membangun pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022?” Kemudian peneliti menentukan subjek atau partisipan penelitian yang relevan seperti pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan paradiplomasi Surabaya-Liverpool di bidang pendidikan inklusif, disusul dengan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara dan studi literatur. Langkah selanjutnya, yaitu peneliti melakukan interpretasi atas data yang telah dikumpulkan seraya mengaplikasikan teori paradiplomasi dan konsep pendidikan inklusif sebagai perangkat analisis, serta ditutup dengan menuliskan hasil penelitian yang menguraikan paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif. Peneliti menganggap ini adalah jenis penelitian yang cocok untuk mengeksplorasi paradiplomasi Surabaya-Liverpool sekaligus menganalisis keterlibatan Kota Surabaya sebagai pemerintah subnasional pada hubungan internasional melalui empat aspek *international actorness*. Mengingat kompleksitas interaksi antara Surabaya dan Liverpool, peneliti turut menggunakan metode deskriptif dalam rangka mengungkap gambaran lengkap seputar topik ini, mencakup penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya, hubungan antarpemerintah, keterlibatan berbagai aktor, serta aspek-aspek internal dan eksternal yang memengaruhi partisipasi Surabaya dalam paradiplomasi dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan unsur penting yang mendefinisikan isu spesifik yang ingin dieksplorasi secara mendalam oleh peneliti. Fokus penelitian juga merepresentasikan batasan yang dapat memandu pemilihan metodologi dan kerangka analisis dalam penelitian ini. Mempersempit cakupan penelitian memungkinkan penelusuran atas data-data yang lebih terkonsentrasi pada suatu isu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait keterlibatan pemerintah subnasional dalam hubungan internasional. Dengan mempertimbangkan tujuan tersebut, Surabaya akhirnya terpilih sebagai fokus penelitian ini, karena Surabaya ialah salah satu kota di Indonesia yang aktif terlibat dalam kerja sama lintas batas. Di samping itu, paradiplomasi Surabaya dengan Liverpool termasuk kolaborasi tingkat kota paling awal antara Indonesia dan Inggris diiringi keunikannya dalam hal bidang kerja sama, sebab secara spesifik menempatkan pendidikan inklusif sebagai salah satu fokus utama yang membedakannya dari kebanyakan paradiplomasi lain (Liverpool City Council, 2019).

Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengungkap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya serta aspek-aspek keterlibatan Surabaya dalam paradiplomasi dengan Liverpool, khususnya berkaitan dengan realisasi penuh upaya kolaboratif mereka untuk mengembangkan kualitas pendidikan inklusif di Surabaya. Paradiplomasi ini masih terjalin hingga sekarang, namun peneliti membatasi cakupannya hanya pada tahun 2017 sampai 2022. Alasan pemilihan rentang waktu 2017–2022 adalah karena tahun tersebut merupakan periode penting dalam pengembangan dan pelaksanaan upaya paradiplomasi di antara keduanya di bidang pendidikan inklusif. Tahun 2017 menjadi waktu ditandatanganinya LoI kerja sama antara Surabaya dan Liverpool, sementara tahun 2022 merupakan tahun di mana kegiatan kolaborasi pada pendidikan inklusif terakhir dilakukan sebelum keduanya memperpanjang MoU kerja sama pada tahun 2023.

3.3 Sumber Data

Penelitian kualitatif umumnya memanfaatkan berbagai bentuk data daripada hanya mengandalkan satu sumber data saja. Dengan demikian, peneliti mengkombinasikan data primer dan sekunder dalam menyusun penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara bersama narasumber yang terlibat pada pelaksanaan paradiplomasi antara Kota Surabaya dan Liverpool di bidang pendidikan inklusif, meliputi:

1. Wawancara bersama Bapak Galih dan Ibu Sasha selaku Staf Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya pada tanggal 19 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan, sumber daya, serta pengalaman atas keterlibatan Kota Surabaya dalam paradiplomasinya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif.
2. Wawancara bersama Ibu Sasi dan Ibu Dina selaku perwakilan dari Direktorat Eropa I, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB untuk secara spesifik memperoleh penjelasan tentang tingkat partisipasi dan strategi, terutama informasi yang berkaitan dengan konteks keterlibatan pemerintah pusat dalam paradiplomasi ini.

Penelitian ini juga melibatkan perolehan data sekunder dari berbagai sumber daring dan publikasi akademik untuk melengkapi informasi terkait paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif. Data sekunder pada penelitian ini mencakup dokumen resmi yang berkaitan dengan interaksi lintas batas Surabaya bersama Liverpool, seperti Matriks Kerja Sama Luar Negeri Kota Surabaya, Buku Pedoman Pendidikan Inklusif di Surabaya, Statistik Sektoral Kota Surabaya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPj) Kota Surabaya, Sightbox UK. Akses dokumen Matriks Kerja Sama Luar Negeri Kota Surabaya difasilitasi oleh Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya, sedangkan dokumen lainnya tersedia di internet.

Lebih lanjut, sumber daring yang dimaksud ialah data-data yang didapatkan dari laman resmi Pemerintah Kota Surabaya (www.surabaya.go.id); laman resmi Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya (www.hukumdankerjasama.surabaya.go.id); Dinas Pendidikan Kota Surabaya; laman St. Vincent's School; Portal Satu Data Pemerintah Kota Surabaya (www.satudata.surabaya.go.id); media sosial Kedutaan Besar Inggris; serta yang berasal dari portal berita, seperti Liverpool Echo, Suara Surabaya, Bangsa Surabaya, ANTARA News, Tempo, Kompas, dan DetikNews, maupun buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi literatur. Tujuan pemilihan kedua teknik tersebut adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang topik utama penelitian. Pemilihan narasumber didasarkan pada penilaian peneliti mengenai relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Langkah tersebut ditempuh agar peneliti mampu memperoleh informasi yang dibutuhkan dan terarah terhadap aspek-aspek pendukung keterlibatan Surabaya dalam paradiplomasi dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif. Untuk tujuan penelitian ini, kriteria yang ditetapkan ialah pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan paradiplomasi tersebut, di antaranya Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya guna memperoleh izin wawancara bersama Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya. Sementara wawancara dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dilakukan setelah peneliti mengajukan permohonan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dikembangkan bagi partisipan yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Pada wawancara semi-terstruktur, peneliti

membuat daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara, serta masing-masing narasumber maupun peneliti memiliki kebebasan dalam menjawab dan memberi pertanyaan lanjutan (Bryman, 2012). Sehingga melalui mekanisme ini, peneliti dapat menggali informasi lebih banyak dari para narasumber. Pertanyaan yang tersusun sebagai pedoman wawancara didasarkan pada aspek keterlibatan masing-masing instansi pada paradiplomasi tersebut, maupun informasi pendukung yang dibutuhkan penelitian (Lampiran A). Karena para narasumber berada di luar cakupan domisili peneliti, wawancara seluruhnya dilakukan secara daring melalui *Zoom Meeting*. Ini dilakukan untuk menjaga akurasi data penelitian sembari menghindari pengeluaran biaya perjalanan yang berlebihan selama proses pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data selanjutnya bergantung pada studi literatur dengan cara memilah dan menganalisis berbagai literatur yang secara khusus memberi informasi relevan terkait paradiplomasi Surabaya-Liverpool dalam bidang pendidikan inklusif. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari sumber daring, utamanya yang diperoleh melalui pesan pribadi, situs web ataupun media sosial resmi Pemerintah Kota Surabaya, Kedutaan Besar Inggris, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menjamin kredibilitas data penelitian. Informasi lainnya kemudian dikumpulkan langsung dari halaman web beberapa portal berita, maupun dari publikasi yang diunduh dalam bentuk dokumen dan laporan resmi, buku, serta penelitian-penelitian terdahulu baik yang dicari secara manual atau mengandalkan beberapa *platform* pendukung dengan memasukkan kata kunci seputar topik penelitian dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Creswell (2007) berpendapat bahwa analisis data adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memahami teks dan gambar dari data yang telah terkumpul. Lebih jauh, Creswell menjelaskan proses ini mencakup memisahkan data, serta menyatukannya kembali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

data yang disarankan oleh Miles *et al.* (2014), yaitu dimulai dari kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data berarti menyortir, memfokuskan, serta menyederhanakan sejumlah data yang telah diperoleh menjadi gabungan data yang dapat lebih mudah ditafsirkan dan dianalisis. Singkatnya, kondensasi data sejatinya mengarah pada pemilahan data mana saja yang relevan dan harus digunakan dalam proses penyajian data. Prosedur ini dapat diterapkan dari sebelum tahap pengumpulan data dengan mengacu pada kerangka teoretis, pertanyaan penelitian, serta teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh peneliti (Miles *et al.*, 2014). Sehingga ketika proses ini, peneliti hanya berfokus pada data yang spesifik dibutuhkan dalam penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya dan paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif. Sementara, data lainnya yang tidak terlalu relevan disisihkan atau dimanfaatkan sebagai informasi tambahan dan pelengkap.

Data yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian ini berasal dari wawancara dan penelusuran sumber daring, meliputi halaman web dan media sosial resmi Pemerintah Kota Surabaya maupun Liverpool, beberapa media *online* yang meliput dan memberitakan paradiplomasi Surabaya-Liverpool di bidang pendidikan inklusif, laporan dan dokumen resmi, juga penelitian-penelitian terdahulu. Prosedur kondensasi data selanjutnya diterapkan pada data yang telah terkumpul dari sumber-sumber tersebut dengan cara membaca dan menerapkan teknik *open coding* melalui pemberian label atau kode untuk mengidentifikasi makna awal berdasarkan pokok-pokok pembahasan yang dibangun pada bab empat demi menjamin bahwa data yang tersaji dalam penelitian ini berisi informasi yang dinilai paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian (Lampiran C).

2. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan Miles and Huberman (1994) sebagai kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan

penarikan kesimpulan. Data-data yang telah melewati proses kondensasi kemudian disusun dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti gambar, grafik, tabel ataupun teks. Tahap ini penting dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan langkah berikutnya yang perlu diambil, yaitu menganalisisnya, maupun membuat kesimpulan. Untuk menjembatani antara data-data mentah yang telah terkondensasi sebelumnya dengan pemahaman terhadap temuan penelitian, peneliti menggunakan kombinasi penyajian data secara tekstual dan visual supaya kompleksitas paradiplomasi Surabaya dan Liverpool, khususnya dalam upaya mengembangkan pendidikan inklusif di Kota Surabaya, dapat diartikulasikan dengan jelas. Alhasil, penyajian data dalam penelitian ini berkontribusi untuk membantu proses analisis sekaligus mendukung penarikan kesimpulan yang berdasar.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir dalam penelitian ini ditempuh dengan berlandaskan pada pemahaman yang peneliti peroleh dari proses kondensasi dan penyajian data sebelumnya. Selain itu, proses ini dipandu oleh bukti berupa data-data yang telah dianalisis menggunakan teori paradiplomasi untuk dapat menuliskan narasi hasil penelitian yang berdasar dan sejalan dengan tujuan penelitian, yakni menjelaskan paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022. Untuk memperkuat bukti-bukti tersebut, penarikan kesimpulan pada penelitian ini juga dilengkapi dengan melakukan verifikasi dan peninjauan ulang terhadap berbagai sumber data untuk memenuhi prinsip triangulasi sekaligus memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari data tersebut valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles and Huberman, 1994).

V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan rangkaian simpulan dan saran penelitian. Simpulan disusun berdasarkan temuan dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya terkait pendidikan inklusif di Kota Surabaya maupun paradiplomasi Surabaya dengan Liverpool pada bidang pendidikan inklusif tahun 2017–2022 yang peneliti analisis menggunakan empat aspek *international actorness* dalam teori paradiplomasi yang dikembangkan oleh Brian Hocking. Sebagai penutup, peneliti juga memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Surabaya, serta beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut bagi akademisi Hubungan Internasional yang tertarik untuk mengangkat topik sejenis dengan penelitian ini.

5.1 Simpulan

Surabaya telah menempuh berbagai langkah positif dalam mengakomodasi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif sejak tahun 2008, yaitu dengan mengembangkan infrastruktur ramah disabilitas, program pembelajaran adaptif dan responsif, menyediakan guru pembimbing khusus (GPK), fasilitas dan layanan pendukung, serta melakukan kolaborasi multisektoral. Meskipun komitmen untuk mengupayakan pemerataan akses pendidikan telah Surabaya realisasikan, hal tersebut tidak secara otomatis menghapus hambatan belajar ABK di Surabaya. Permasalahan dalam hal aksesibilitas, ketimpangan alokasi sumber daya di antara sekolah inklusi, maupun tidak semua sekolah inklusi memiliki GPK dengan kemampuan memadai dan jumlah yang proporsional menciptakan kesenjangan yang membatasi efektivitas dan jangkauan program pendidikan inklusif di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa

pendidikan inklusif di Surabaya membutuhkan pengembangan lebih lanjut demi seutuhnya mewujudkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif.

Dalam konteks penelitian ini, paradiplomasi dengan Liverpool dilakukan sebagai respons strategis Surabaya terhadap keterbatasan internalnya. Surabaya mengartikulasikan tujuan yang terarah dari paradiplomasi ini sebagai sarana mencapai inklusifitas penuh pada pendidikan inklusifnya melalui bantuan Liverpool, yang sekaligus menegaskan klaim Brian Hocking bahwa paradiplomasi adalah cara pemerintah subnasional memperbaiki kekurangan mereka. Pengerahan sumber daya dari APBD, serta sinergi antara Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya maupun Wali Kota Surabaya memungkinkan terlaksananya paradiplomasi Surabaya dengan Liverpool. Selain itu, Surabaya menjalin hubungan eksternalnya sambil beroperasi di dalam batasan-batasan regulasi nasional. Alhasil, walau menerapkan *primary strategy*, Surabaya tidak bergerak sendiri, melainkan tetap terlibat dalam interaksi berlapis bersama mitra maupun pemerintah pusat pada seluruh tahapan paradiplomasi tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, paradiplomasi Surabaya dengan Liverpool sudah mencapai keberhasilan parsial dalam menjawab permasalahan pendidikan inklusif di Surabaya. Pelaksanaan paradiplomasi ini bermanfaat bagi salah satu permasalahan pada pendidikan inklusif di Surabaya. Namun, isu aksesibilitas maupun fasilitas belajar belum tersentuh dan terbantu penyelesaiannya, karena paradiplomasi Surabaya-Liverpool berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik saja. Singkatnya, jangkauan dan hasil dari paradiplomasi Surabaya dengan Liverpool pada dasarnya masih terbatas. Melalui kerangka analisis yang dikembangkan oleh Hocking, Surabaya telah memperlihatkan kapasitasnya sebagai aktor yang mampu menerjemahkan kebutuhan internal dan peluang eksternalnya ke dalam suatu keterlibatan internasional dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia dan strategi yang sesuai untuk meraih kepentingannya. Hal ini membingkai bagaimana Surabaya selaku pemerintah subnasional dapat memperluas cara untuk menyelesaikan masalah melampaui batas wilayahnya, yakni dengan menggunakan paradiplomasi sebagai kendaraan untuk menjalin interaksi lintas batas sekaligus mengatasi permasalahan di tingkat lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Paradiplomasi Kota Surabaya dengan Liverpool pada Bidang Pendidikan Inklusif, 2017–2022” ini, peneliti mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Surabaya dan akademisi Hubungan Internasional. Berikut adalah saran-saran tersebut, antara lain:

- A. Kepada para akademisi Hubungan Internasional yang memiliki minat untuk mengkaji topik serupa, diharapkan dapat membawa kebaruan data dan informasi terhadap penelitian seputar paradiplomasi yang dilakukan oleh Surabaya dengan Liverpool. Pertama, penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi perkembangan terbaru dari paradiplomasi Surabaya-Liverpool pada bidang pendidikan inklusif pasca perpanjangan *Memorandum of Understanding* (MoU) tahun 2023. Kedua, penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas bahasan penelitian ini dengan membandingkan tujuan, sumber daya, tingkat partisipasi, dan strategi paradiplomasi Surabaya dengan kota-kota lain. Kedua saran tersebut tentunya akan semakin memperkaya dan melengkapi temuan pada penelitian ini.

- B. Kepada Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat memperluas cakupan paradiplomasi ini agar tidak terbatas pada peningkatan kualitas tenaga pendidik semata. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan untuk berinvestasi lebih dalam membekali para personel yang terlibat dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan, utamanya mengenai mekanisme pelaksanaan paradiplomasi dengan mitra asing. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan manfaat paradiplomasi sekaligus membantu mencegah kesalahan langkah atau kesalahpahaman serius selama proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalatul Hikmah, D., Prasetyo, K., Azmy Musaddad, A., Arum Pramestya, E., & Devi Lestari, I. (2022). Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat). *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 8(3), 10–20. <https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/180>
- Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto. (2014). *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*. Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia in collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). [https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Disabilities_report_Final_sept2014_\(1\)-1.pdf](https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Disabilities_report_Final_sept2014_(1)-1.pdf)
- Aguirre, I. (2013). Making Sense of Paradiplomacy? An Intertextual Enquiry about a Concept in Search of a Definition. In F. Aldecoa & M. Keating (Ed.), *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. Routledge.
- Agustina, R. S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 109–124. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p109-124>
- Ainscow, M. (2013). Making sense of inclusive education. *Trinity Education Papers: Examining theory and practice in inclusive education*, 2(2).
- Al-Gifari, A., Kusumo, A., & Rahayu, S. (2024). Legal Analysis of the International Agreement on Sister City Cooperation Surabaya-Liverpool in Conducting Parallel Diplomacy. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i2.86>
- Anany, A. F. (2021). *Implementasi Program Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Kualitas Akademik Siswa Berkebutuhan Khusus Di SMP Negeri 13 Surabaya*.

- Antara News. (2019). *Tujuh anak berkebutuhan khusus Surabaya ikuti pendidikan di Liverpool*. <https://www.antaraneews.com/berita/917379/tujuh-anak-berkebutuhan-khusus-surabaya-ikuti-pendidikan-di-liverpool>
- Augesti, A. (2018). *Dubes Inggris untuk Indonesia: Surabaya Punya Kesamaan dengan Liverpool*. Liputan 6. [https://www.liputan6.com/global/read/3642935/dubes-inggris-untuk-indonesia-surabaya-punya-kesamaan-dengan-liverpool#:~:text=Kedatangan Joe Anderson dan Gary Millar adalah hasil,bekerja sama dengan Surabaya dan mengembangkan hubungan formal](https://www.liputan6.com/global/read/3642935/dubes-inggris-untuk-indonesia-surabaya-punya-kesamaan-dengan-liverpool#:~:text=Kedatangan%20Joe%20Anderson%20dan%20Gary%20Millar%20adalah%20hasil,bekerja%20sama%20dengan%20Surabaya%20dan%20mengembangkan%20hubungan%20formal)
- Bagian Hukum dan Kerja Sama. (n.d.). *Tugas dan Fungsi Bagian Hukum dan Kerjasama*. <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi/>
- Bagian Hukum dan Kerja Sama. (2023). *Matriks Kerja Sama Luar Negeri Kota Surabaya-Liverpool*.
- Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya. (2025). [Komunikasi pribadi]
- Bindhani, S., & Gopinath, G. (2024). Inclusive Education Practices: A Review of Challenges and Successes. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://www.ijfmr.com/papers/2024/2/17341.pdf>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion: developing learning and participation in schools*. The Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Cheelo, C. (2016). *Challenges Faced in the Implementation of Inclusive Education in Selected Rural Primary Schools of Solowezi District*. <http://dspace.unza.zm/handle/123456789/4949>
- Chimwaza, E. S. (2016). *Challenges in Implementation of Inclusive Education in Malawi: a case study of Montfort Special Needs Education College and selected primary schools in Blantyre*. <https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/bitstream/handle/11250/2385760/Masteroppgave2015ChimwazaEmmanuelBlessings.pdf?sequence=1>
- Cornago, N. (2000). Exploring the global dimensions of paradiplomacy: Functional and normative dynamics in the global spreading of subnational involvement in international affairs. *Workshop on Constituent Units in International Affairs*.

- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (Second Edi). Sage Publications, Inc.
- Department for Communities and Local Government. (2017). *Devolution: A Mayor for Liverpool City Region, What Does It Mean?*
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. (2022). Sosial Budaya. In *Statistik Sektoral Pemerintah Kota Surabaya*. https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2022/7/68195/2021_BAB_4_-_Sosial_Budaya.pdf?1657705064
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2014a). *Implementasi Pendidikan Inklusi Surabaya*. <https://dispendik.surabaya.go.id/implementasi-pendidikan-inklusi-surabaya/>
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2014b). *Kadispindik : Surabaya Raih Inklusi Awards 2014*. <https://dispendik.surabaya.go.id/kadispindik-surabaya-raih-inklusi-awards-2014/>
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2024). *Buku Panduan Pendidikan Inklusif SMP*. Buku-Panduan-Inklusif-Dinas-Pendidikan-Kota-Surabaya.pdf
- Duchacek, I. (1984). The International Dimension of Subnational SelfGovernment. *Publius: The Journal of Federalism*, 14(4), 5–31.
- Ediyanto, Sunandar, A., & Junaidi, A. (2021). *Pendidikan Inklusif dan Guru Pembimbing Khusus di Indonesia* (Cetakan I). Universitas Negeri Malang.
- Farrell, P., & Ainscow, M. (2002). *Making Special Education Inclusive: From Research to Practice*. David Fulton Publishers. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203437261>
- Fatimah, S., & Rohman, A. (2025). Implementasi Kerja Sama Sister City Surabaya-Liverpool dalam Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Inklusi. *SIYAR Journal*, 5(1), 24–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/siyar.2025.5.1.24-43>
- Febriyanti, N. (2014). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. *Publika*, 2(2).
- Fitriana, N. M. N., Hakiki, B. N. N., & Rubiyanto, C. W. (2022). The Impact of Sister City Surabaya-Kitakyushu Cooperation on Environmental Development in Surabaya. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v1i1.15>

- Gertler, M. S., & Wolfe, D. A. (1997). Region State Networking: Ontario and the Four Motors for Europe. In *Paper presented to the 38th International Studies Association Convention*.
- Gidley, J. M., Hampson, G. P., Wheeler, L., & Bereded-Samuel, E. (2010). Social Inclusion: Context, Theory and Practice. *The Australasian Journal of University-Community Engagement*, 5(1), 6–36.
- Hafiz, A. (2017). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 9–15.
- Hakim, A. (2019a). 23 Persen APBD Surabaya untuk Pendidikan. Antara News. [https://jatim.antaranews.com/berita/306374/23-persen-apbd-surabaya-untuk-pendidikan#:~:text=Surabaya %28ANTARA%29 - Pemerintah Kota Surabaya di Jawa,pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah](https://jatim.antaranews.com/berita/306374/23-persen-apbd-surabaya-untuk-pendidikan#:~:text=Surabaya%28ANTARA%29-Pemerintah Kota Surabaya di Jawa,pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah)
- Hakim, A. (2019b). Catatan perjalanan Tim Delegasi Pendidikan Surabaya ke Liverpool. <https://www.antaranews.com/berita/926570/catatan-perjalanan-tim-delegasi-pendidikan-surabaya-ke-liverpool#:~:text=Tim delegasi tersebut terdiri dari delapan pendamping dan,sekolah lainnya yakni Reva G dan Muhammad Hilbram>
- Hakim, L. (2021). Anggaran Rp7,9 Triliun Dialokasikan untuk Sektor Pendidikan di Jawa Timur. Sindo News. <https://daerah.sindonews.com/read/615049/704/anggaran-rp79-triliun-dialokasikan-untuk-sektor-pendidikan-di-jawa-timur-1638317532>
- Hata, A., Yuwono, J., Purwana, R., & Nomura, S. (2021). *Embracing Diversity and Inclusion in Indonesian Schools – Challenges and Policy Options for the Future of Inclusive Education*. World Bank Publications.
- Hocking, B. (1993). Non-central Governments and Multilayered Diplomacy. In *Localizing foreign policy: Non-central governments and multilayered diplomacy* (hal. 31–69). The Macmillan Press.
- Hocking, B. (1999). Patrolling the ‘Frontier’: Globalization, Localization and the ‘Actorness’ of Non-Central Governments. In F. Aldecoa & M. Keating (Ed.), *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments* (hal. 17–39). Frank Cass.
- Keating, M. (2013). Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies. In *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments* (hal. 1). Routledge.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). [Komunikasi pribadi]

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikbud_Tahun2009_Nomor070.pdf
- Kornus. (2017). *DPRD Surabaya Setujui Sister City Surabaya-Liverpool Inggris*. Media Koran Nusantara. <https://mediakorannusantara.com/dprd-surabaya-setujui-sister-city-surabaya-liverpool-inggris/>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs* (C. Bjola & M. Kornprobst (ed.)). Routledge.
- Melani, A. (2019). *Sekolah Inklusi Butuh Pembenahan di Surabaya*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4128083/sekolah-inklusi-butuh-pembenahan-di-surabaya>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Mizunoya, S., Mitra, S., & Yamasaki, I. (2018). Disability and school attendance in 15 low- and middle- income countries. *World Development*, 104, 388–403. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.001>
- Mohammad, H., & Dofir, M. (2023). *Pemkot Surabaya Belum Siap Jalankan Aturan Sekolah Formal Wajib Tampung Disabilitas*. VIVA Jatim. <https://jatim.viva.co.id/kabar/8943-pemkot-surabaya-belum-siap-jalankan-aturan-sekolah-formal-wajib-tampung-disabilitas>
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia* (S. P. Permana & A. Sahide (ed.)). The Phinisi Press.
- Mulyadi, A. W. E. (2017). Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 1(3), 201–212.
- Munaiyah. (2024). *Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/implementasi-program-pendidikan-inklusi-di-kota-surabaya/>
- Nany. (2024). *Dibutuhkan: SLB Negeri untuk Layanan Lebih Inklusif*. Independen. <https://independen.id/dibutuhkan-slb-negeri-untuk-layanan-lebih-inklusi/>

- Nganje, F. (2014). Paradiplomacy and Democratisation of Foreign Policy in South Africa. *South African Journal of International Affairs*, 21(1), 89–107.
- Ningrum, K. (2020). *Studi Evaluatif Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurhakim, Y. F., & Furnamasari, Y. F. (2023). Sikap Guru Dalam Menghadapi Siswa Yang Berkebutuhan Khusus Di Kelas 2 SDN Jelegong 01 Rancaekek. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(3), 155–176.
- Nuryananda, P., Firdaus, M. J. B., & Elifansyah, D. (2018). Surviving Brexit Britain Deepening Cooperation on Asian Market: Case of Liverpool-Surabaya Sister City. *Politics, Economy, and Security in Changing Indo-Pacific Region*, 410–415. <https://doi.org/10.5220/0010278000002309>
- Pedada, S. (2023). *Building On The Past: How To Write Previous Studies In Research*. Mind the Graph. <https://mindthegraph.com/blog/how-to-write-previous-study-in-research/>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Sosial Budaya. In *Statistik Sektor Kota Surabaya*. https://satudata.surabaya.go.id/files/sektoral/2022/4_Bab_IV_Sosial_Budaya.pdf
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *SD-SMP Wajib Terima Siswa ABK, Dispendik Surabaya: Dilaksanakan di Tahun Ajaran Baru*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/78059/sd-smp-wajib-terima-siswa-abk-dispendik-surabaya-dilaksanakan-di-tahun-ajaran-baru>
- Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 1–9. <https://litabmas.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/download/317/324>
- Putranto, D. A. (2019). *Latar Belakang Kerjasama Program Sister City Kota Surabaya – Liverpool* [UPN Veteran Yogyakarta]. <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/21106>
- Putri, A. W. (2022). *Saat Negara Mengebiri Hak Pendidikan Anak Disabilitas*. Tirto. <https://tirto.id/saat-negara-mengebiri-hak-pendidikan-anak-disabilitas-gw3t>
- Putri, L. (2016). *Analisa Persebaran Sekolah Menengah untuk Anak Penyandang Disabilitas Fisik Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kota Surabaya)*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- Putro, E., Simanjuntak, T., & Hergianasari, P. (2023). Multi Stakeholder Partnership dalam Kerjasama Sister City Surabaya-Liverpool pada Pendidikan Inklusi Berkelanjutan Tahun 2022. *Jurnal Neo Societal*, 8(2), 109–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/jns.v8i2.10>
- Racman, R. (2020). Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Bidayatuna*, 03(01).
- Rajab, A. B. D. U. L. (2018). Tugas Pokok Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SDN Surabaya. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 10(4), 1–48.
- Ramli, N. H., & Sujarwanto. (2018). Studi Deskriptif Manajemen Pendidikan Inklusif di SMA. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 1–20.
- Rana, U. (2025). *The Evolution of Education in Liverpool: A Historical Overview*. Ucademy. <https://www.ucademy.co.uk/blogs-post/the-evolution-of-education-in-liverpool-a-historical-overview>
- Rimapradesi, Y., & Latief, M. (2023). Analisis Keberlangsungan Kolaborasi Pemerintahan Kota Surabaya dengan Liverpool Dalam Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Inklusi Sebagai Manifestasi Dari Program SCI (Sister Cities International) 2022. *Dialektika Publik*, 7(2), 13–26.
- Rosari, U. S., Albab, U., & Suroso. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 81–94. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/6743>
- Said, Z. (2017). *The Implementation of National Inclusive Education Strategy in Primary Schools in Morogoro Municipality, Tanzania*. <https://core.ac.uk/download/pdf/161548305.pdf>
- Sambogo, A., & Tejo, A. (2019). *Ini Kabar Terbaru Para ABK yang Dikirim Risma ke Inggris*. <https://www.ngopibareng.id/read/ini-kabar-terbaru-para-abk-yang-dikirim-risma-ke-inggris-4910488>
- Septaralinda, K. B. (2021). *Implementasi Kerjasama Sister City Surabaya–Liverpool dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Inklusif di Surabaya*. 18(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/S11067-018-9419-9>
- Sightbox Trust UK. (n.d.). *About Sightbox Trust*.
- Sjöstedt, G. (1977). *The External Role of the European Community*. Saxon House.
- Sudarto, Z., & Sasongko, T. (2020). Analysis of Implementations Inclusive Education in Surabaya City. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 4(1), 37–42.

- Suhendri. (2020). The Challenges of Inclusive Education in Indonesia. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(5), 1002–1007.
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 30 Seri E).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16)
- Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- UNESCO. (2004). *The Right to Education for Persons with Disabilities: A Conceptual Paper*. UNESCO.

- UNESCO. (2014). *Inclusive Education: The Salamanca World Conference on Special Needs Education*. <http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/what-is-inclusiveeducation/background/>
- UNESCO. (2015). *EFA Global Monitoring Report: Education for All 2000-2015, Achievement and Challenges*. UNESCO Publisher.
- UNESCO. (2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*. UNESCO. <https://doi.org/https://doi.org/10.54675/MHHZ2237>
- UNICEF. (n.d.). *Inclusive education: Every child has the right to quality education and learning*. Diambil 23 Desember 2024, dari <https://www.unicef.org/education/inclusive-education>
- UNICEF Indonesia. (2023). *Memberdayakan Setiap Anak Merangkul Keanekaragaman dan Inklusi untuk Semua: Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. [https://www.unicef.org/indonesia/media/22016/file/Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/22016/file/Analisis%20Lanskap%20tentang%20Anak%20Penyandang%20Disabilitas%20di%20Indonesia.pdf)
- Widi, A. (2016). *Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya*. <https://repository.unair.ac.id/67668/3/Sec.pdf>
- Yahya, N., Nursita, R., & Kohar, H. (2023). Enhancing Halal Tourism through Paradiplomacy: Institutional Challenges and Opportunities in the NTB-Bukhara Collaboration. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 2(2), 83–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jpcn.v2i2.42>
- Yunarto, A., Sugihermanto, Setiawan, T., Tanuwidjaja, G., Indhiraswari, S. A., & Wulandari, D. (2021). The Advocacy of Disability Service Unit in the Education Sector in the City of Surabaya. *International Journal of Disabilities and Social Inclusion (IJODASI)*, 01(01). https://repository.petra.ac.id/19069/1/Publikasi1_10012_7032.pdf
- Zartman, I. (1989). Prenegotiation: Phases and Functions. *International Journal*, 44(2), 237–253.
- Zartman, I. (2008). *Negotiation and Conflict Management: Essays on theory and practice*. Routledge.
- Zubeda, M. (2020). *Teachers Perceptions on The Implementation of Inclusive Education in Public Primary Schools in Tanzania: A Case of Njombe Town Council*. [https://repository.out.ac.tz/2806/1/DISSERTATION -ZUBEDA MWAMBE - FINAL.pdf](https://repository.out.ac.tz/2806/1/DISSERTATION%20-%20ZUBEDA%20MWAMBE%20-%20FINAL.pdf)